

MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP  
PEGAWAI TETAP PADA PT. KERSNA PUTRA  
AGUNG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Mark UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Terima : Tgl. 04 JUL 2003  
Oleh : No. 1000

Klass  
336.2  
Jul  
m

Wahyu Julianto

990903101004

Pembimbing

Drs. RAHMAT MURJANA S, MM

NIP. 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2003

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

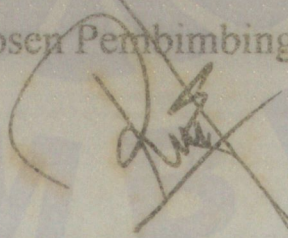
Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**Nama :WAHYU JULIANTO**  
**NIM :990903101004**  
**Program Studi :Diploma-III Perpajakan**  
**Judul : “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada PT. Kersna Putra Agung Jember”.**

Jember, 7 Pebruari 2003

Menyetujui :

Dosen Pembimbing



**Drs. RAHMAT MURJANA, S, MM**

**NIP. 130 523 059**

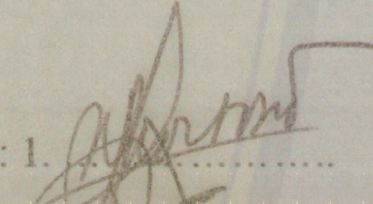
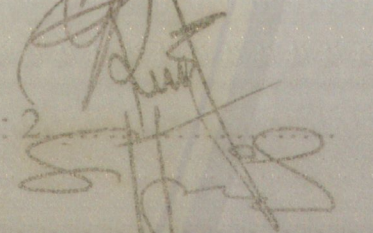
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA-III PERPAJAKAN**  
**PENGESAHAN**

Telah dipertahankan Di hadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : WAHYU JULIANTO  
Nim : 990903101004  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**“ MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT. KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER ”.**

Hari : Selasa  
Tanggal : 25 Pebruari 2003  
Jam : 14.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan Lulus

	Panitia Penguji	
1. Drs. SUHARTONO, MP NIP. 131 782 187	(Ketua)	: 1. 
2. Drs. RAIMAT MURJANA, S, MM NIP. 130 523 059	(Sekretaris)	: 2. 
3. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si NIP. 131 658 389	(Anggota)	: 3. ....

Mengesahkan,  
UNIVERSITAS JEMBER  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Dekan,

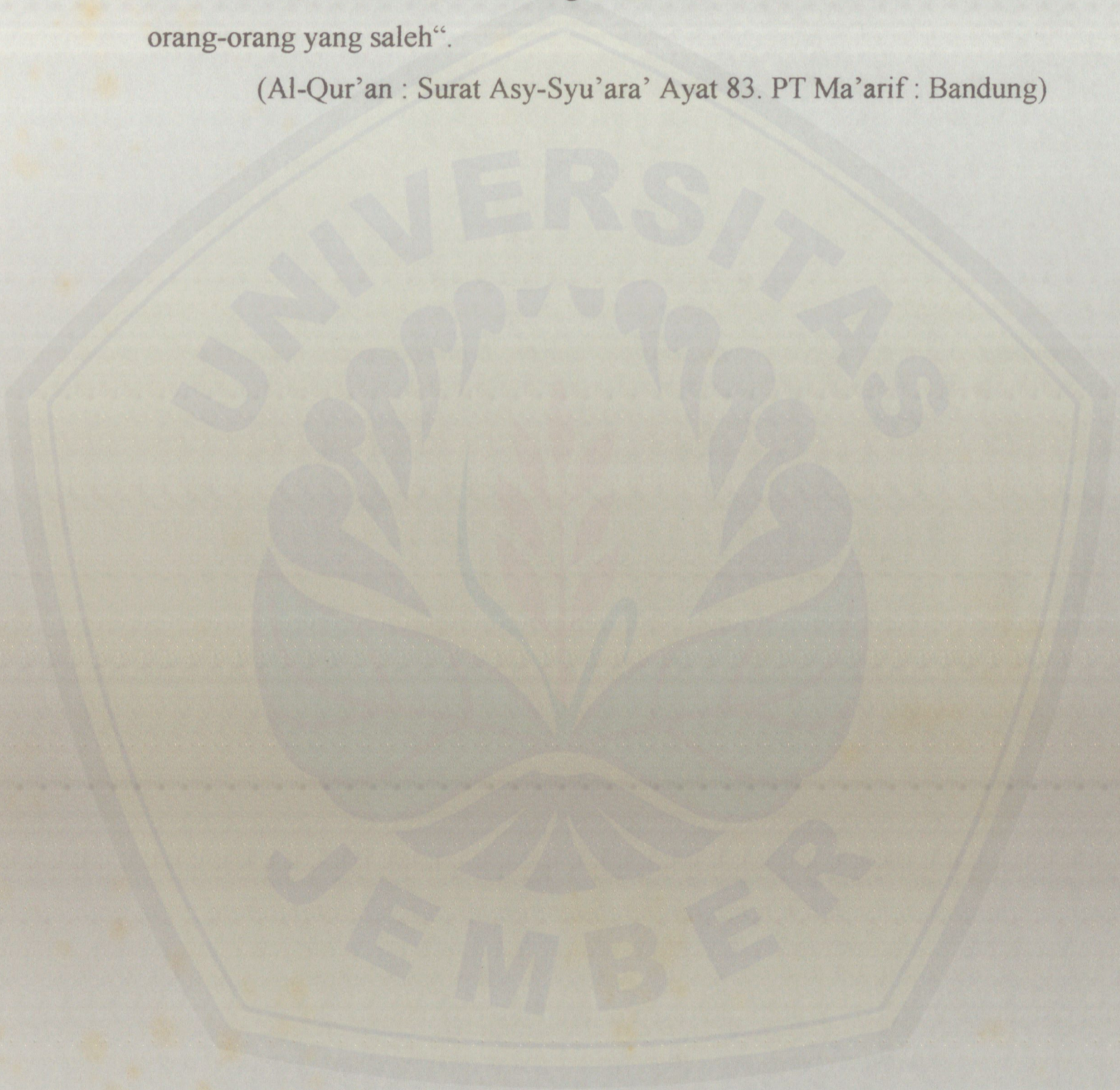


**Drs. H. MOCH. TOERKI**  
NIP. 130 524 832

**MOTTO**

“Ya Tuhanku, berilah aku Ilmu Pengetahuan dan masukkanlah Aku kedalam orang-orang yang saleh“.

(Al-Qur'an : Surat Asy-Syu'ara' Ayat 83. PT Ma'arif : Bandung)



## PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk :

1. Almarhum Papiku yang selalu memberi bimbingan kepadaku dan semoga Beliau diterima disisi-Nya.
2. Mamiku Tercinta yang telah memberikan bimbingan, dorongan secara moral maupun spiritual serta Do'a demi keberhasilan dan kesuksesan Ananda.
3. Kakak-Kakakku yang tercinta : Mas Eddy, Mbak Endang, dan Mbak Yuli terimakasih atas bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan kuliah.
4. Teman-Teman Mahasiswa Pajak 99 tak terkecuali.
5. Almamater yang aku banggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyusun Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA PT. KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER”**, dengan baik.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna menyelesaikan Program Studi Diploma-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan Laporan ini penulis sadari masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Laporan ini. Selain itu dalam pembuatan Laporan ini banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Achmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma-III Perpajakan.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing selama menjadi mahasiswa Program Studi Diploma-III Perpajakan.

5. Bapak Drs. Rahmat Murjana. S, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta kesediaannya untuk membimbing Laporan ini.
6. Bapak Drs. M. Nasir Dahlan selaku Direktur PT. Kresna Putra Agung Group Jember yang telah memberikan izin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan seluruh Staff PT. Kersna Putra Agung Jember.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Sahabat-Sahabat terbaik dalam hidupku : Antok”MU”, Afit”Inter”, Ipul”SB”, dan Dayat”Madas” persahabatan kita akan abadi selalu.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga kepada penulis sehingga Laporan ini dapat dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga Laporan ini kelak dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya, khususnya tentang Perpajakan.

Jember, Pebruari 2003

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	3
1.2.1 Tujuan Program Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	3
1.2.2 Kegunaan Program Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	5
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan .....	5
2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	5
2.1.2 Tugas dan Wewenang Pada Masing-Masing Bagian .....	6
2.2 Usaha PT. Kersna Putra Agung Jember .....	9
2.3 Pelaksanaan Produksi .....	10
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) .....	11

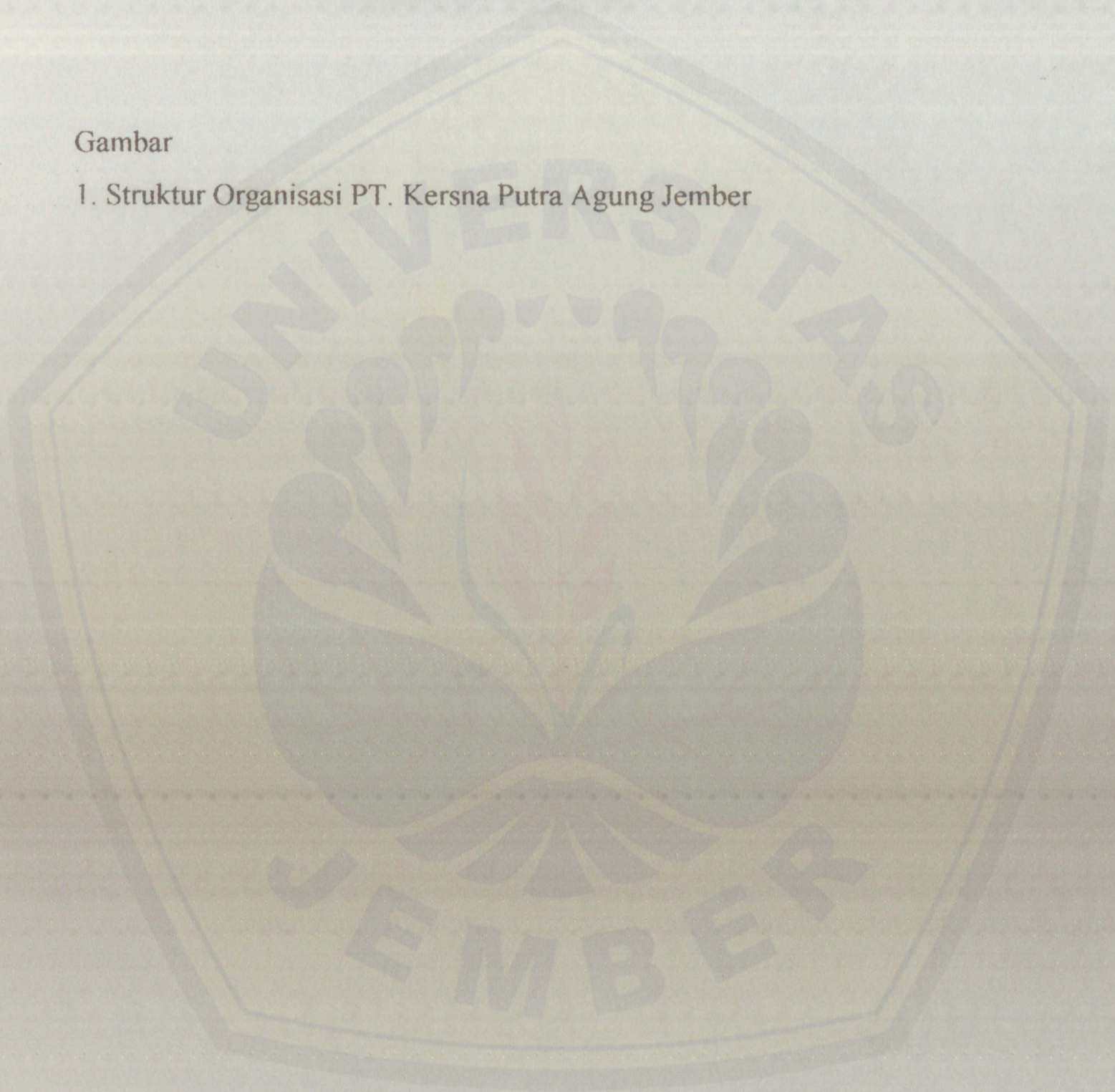


3.1 Diskripsi (Gambaran) Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	11
3.1.1 Pengertian (Istilah) Dalam Perpajakan .....	13
3.1.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap .....	17
3.1.3 Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di PT. Kersna Putra Agung Jember .....	19
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.....	19
IV. PENUTUP .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	22
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi PT. Kersna Putra Agung Jember



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas.
2. Surat Keterangan selesai PKN dari PT. Kersna Putra Agung Jember.
3. Struktur Organisasi PT. Kersna Putra Agung Jember.
4. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Kersna Putra Agung Jember.
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Badan PT. Kersna Putra Agung Jember.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis multidimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini sungguh berat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terpuruknya sektor ekonomi, adanya ancaman disintegrasi bangsa, instabilitas keamanan, tingginya tingkat pengangguran dan banyak lagi masalah yang menimbulkan lingkaran setan (Vicious Circle) kesengsaraan yang harus diterima dan segera diselesaikan.

Bagi dunia usaha tuntutan efisiensi yang disertai peningkatan produktivitas serasa mustahil untuk diwujudkan. Yang terjadi adalah tingginya biaya produksi dan penurunan omzet penjualan yang dikarenakan penurunan pendapatan bagi perusahaan, memang pada kenyataannya daya beli (Purchasing Power) masyarakat sangat lemah. Dari ilustrasi diatas jelas implikasi riilnya pada sektor penerimaan pajak bagi pemerintah.

Sungguhpun demikian, bangsa Indonesia telah bertekad untuk melanjutkan terus pembangunan dan berupaya untuk dapat meningkatkannya guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang memerlukan dukungan dana yang tersedia secara berkelanjutan. Pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu pada kemandirian. Kemandirian sendiri bisa diartikan pengurangan ketergantungan perekonomian terhadap luar negeri, mengurangi campur tangan luar negeri dan meningkatkan kemampuan penggunaan dan pengalihan potensi yang ada. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana pembangunan yang bersumber dari pajak, tabungan pemerintah, masyarakat serta devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa.

Kondisi krisis ekonomi yang belum mengisyaratkan tanda-tanda kearah pemulihan keadaan, diperparah lagi dengan situasi sosial dan politik yang tidak



menentu, dimana-mana terjadi kerusuhan, tuntutan merdeka dari beberapa daerah, perseteruan politik antara lembaga legislatif dan eksekutif, dan masih banyak lagi persoalan dalam negeri yang dapat menciptakan iklim panas yang berdampak semakin terpuruknya iklim usaha di Indonesia. sementara disisi lain, tuntutan pembangunan jangka panjang dewasa ini lebih diharapkan mengarah pada sektor usaha industri.

Peranan penerimaan negara dari sektor pajak adalah sangat besar dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dan dan pembiayaan kegiatan pembangunan telah diupayakan, agar sumber dananya diperoleh sebagian dari dalam negeri yaitu antara lain melalui sektor perpajakan, devisa dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan akan semakin besar, sebagaimana tujuan reformasi perpajakan pada awal tahun 1984 yang lalu.

PT. Kersna Putra Agung Jember selain sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat dibidang penyediaan rumah baik Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS), juga mempunyai kewajiban mentaati peraturan untuk membayar pajaknya tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentunya memudahkan bagi para Wajib Pajak dan pemotong pajak dapat melakukan kewajibannya secara benar sebagai wajib pajak dan/atau, pemotong pajak penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atas jasa pribadi.

Dengan adanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP 545/PJ.1/2000 tentang Pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa/kegiatan Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi, PT. Kersna Putra Agung Jember berkewajiban melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan/karyawati, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25. Pelaksanaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Sebagai Badan Usaha Milik Swasta yang ditunjuk untuk memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, maka PT. Kersna Putra Agung Jember wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 baik itu atas gaji, upah, maupun honorarium yang berhubungan dengan pekerjaan atas jasa pribadi. Adapun pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Kresna Putra Agung Group Jember sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meninjau kegiatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui judul laporan magang : **“MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER”**.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

1. Menerapkan pengetahuan perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan kedunia kerja atau dunia usaha.
2. Untuk mengetahui administrasi khususnya administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ada di PT. Kersna Putra Agung Jember.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

1. Memperoleh pengalaman dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam lapangan kerja secara kongkret dengan segala fenomenanya

2. Mengkaji teori Perpajakan yang diperoleh diperkuliahan dengan kegiatan perpajakan di PT. Kersna Putra Agung Jember yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa D III Perpajakan.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Kersna Putra Agung Jember berdiri seiring dengan terbukanya peluang bisnis dibidang properti pada tahun 1993, dimana pada saat itu tingkat permintaan akan rumah hunian sangat tinggi. Disamping terbukanya kerjasama dengan pihak perbankan sebagai mitra didalam membantu pembiayaan bagi para konsumen.

Guna memudahkan didalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Jember yang bergerak dibidang properti dan kontraktor umum maka dijalinlah suatu bentuk kerjasama dengan PT. Garoeda Buana Indah di Pasuruan meskipun pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada bentuk kerjasama yang kongkret dengan PT Garoeda Buana Indah di Pasuruan. Pada awal berdirinya PT. Kersna Putra Agung Jember berkantor / bertempat kedudukan di Jl Trunojoyo dengan meletakkan prioritas usahanya pada bidang properti meskipun juga melayani bidang usaha lain sebagai general kontraktor. Bentuk nyata didalam memfokuskan usahanya dibidang properti ditandai dengan aktivitas usahanya sebagai pengembang dan pengelola perumahan "Pondok Gede Permai" yang secara diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Bapak Akbar Tanjung.

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pada tahun 1999 kantor PT Kersna Putra Agung di Jl Trunojoyo dipindahkan di Jl Basuki Rahmat yang tak lain sebagai tempat usaha / proyek pengembangan rumah PT Kersna Putra Agung Jember.

#### 2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari suatu perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, maka dibutuhkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menunjang proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya



pengorganisasian yang tepat, karena tanggungjawab dan wewenang pelaksana perlu adanya penetapan hubungan kerja agar proses kerjasama dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi adalah menunjukkan kondisi yang statis tentang tugas-tugas masing-masing bagian dalam instansi atau perusahaan, pendistribusian dan penempatan sumber daya manusia yang lebih obyektif sesuai dengan falsafah "The right man in the right place", atau profesionalitas dengan kemampuan pada tempat / posisi yang tepat.

Meskipun hanya memiliki karyawan administrasi yang terbatas pada PT. Kersna Putra Agung juga memiliki struktur organisasi beserta pelaksanaan fungsi-fungsinya secara teratur. Struktur organisasi PT Kersna Putra Agung Jember mempunyai bentuk struktur organisasi baris, yaitu arus komunikasi dimulai dari atas kebawah, sebagaimana terlihat di skema pada lampiran karya tulis ini.

### 2.1.2 Tugas dan Wewenang Pada Masing-masing Bagian

#### Tugas dan wewenang Direktur

1. Penanggung jawab utama terhadap kesinambungan usaha perusahaan
2. Memberikan garis pokok kebijaksanaan perusahaan.
3. Secara berkala memberikan pengarahan umum pada segenap karyawan
4. Mensahkan surat-surat yang berkaitan dengan proses transaksi dengan konsumen.
5. Sebagai pengambil keputusan penting pada perusahaan, misal : mengambil keputusan tentang investasi.

#### Tugas dan wewenang Wakil Direktur

1. Secara umum bertanggungjawab terhadap aktivitas perusahaan guna memberikan masukan atau laporan kepada Direktur.
2. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan kondisi obyektif perusahaan.

3. Mengkoordinir semua bagian diperusahaan agar dapat bekerjasama secara dinamis.

#### Tugas dan wewenang Bagian Produksi

1. Bertanggungjawab penuh terhadap proses produksi dilapangan termasuk terhadap kualitas rumah yang dihasilkan perusahaan.
2. Mengawasi dan memberi pengarahan pada segenap pekerja dilapangan.
3. Mengajukan permintaan bahan produksi untuk dapat diteruskan pada bagian keuangan.
4. Menjaga lokasi produksi agar sesuai dengan maket yang telah dirancang oleh perusahaan.
5. Memberikan laporan pada Direktur melalui Wakil Direktur.
6. Merancang daftar rencana produksi termasuk lokasi, bahan maupun para pekerja dilapangan.
7. Mengambil kebijaksanaan teknis dilapangan.
8. Membuat perencanaan jumlah karyawan tidak tetap yang akan digunakan oleh perusahaan.

#### Tugas dan wewenang Bagian Pemasaran dan Humas

1. Bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas pemasaran atau penjualan rumah.
2. Bertanggungjawab melakukan kegiatan promosi termasuk mengenai konsep promosi, biaya promosi dan wahana didalam melakukan promosi.
3. Memberikan rekomendasi untuk komisi bagi orang yang telah membantu atau mendorong para konsumen didalam proses pembelian rumah.
4. Mewakili perusahaan didalam aktivitas diluar perusahaan apabila Direktur tidak dapat menghadiri.

#### Tugas dan wewenang Bagian Keuangan

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

2. Merencanakan anggaran pembelanjaan perusahaan.
3. Memeriksa nota-nota kas keluar dan kas masuk perusahaan.
4. Mempersiapkan data-data dan informasi dalam rangka memberi masukan pada atasan khususnya dalam hal investasi.
5. Memberikan masukan berupa saran-saran teknis kepada atasan apabila diperlukan.
6. Menyusun laporan keuangan secara komprehensif guna dijadikan landasan kebijaksanaan perusahaan.
7. Menyusun dan melaporkan laporan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
8. Membuat rekapitulasi gaji mingguan para tukang dan pembantu tukang dilapangan sebagai karyawan tidak tetap.

#### Tugas dan wewenang Bagian Administrasi

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi baik itu keuangan, hutang piutang, perpajakan, serta administrasi umum dan personalia.
2. Memberikan masukan (input) kepada atasan atau Wakil Direktur dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
3. Membantu atasan dalam melakukan analisa-analisa data yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

#### Tugas dan wewenang Bagian Sales

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pemasaran atau aktivitas penjualan rumah.
2. Bertanggung jawab melakukan kegiatan promosi termasuk mengenai konsep promosi, biaya promosi, dan wahana yang akan digunakan untuk promosi.
4. Memberikan Laporan Penjualan rumah kepada Direktur yang telah dibeli oleh konsumen, baik itu secara tunai maupun secara inden.

5. Memberi masukan ke Bagian Produksi tentang Kualitas rumah yang diharapkan oleh pembeli.

#### Tugas dan wewenang Bagian Aplikasi Kredit

1. Bertanggungjawab terhadap kredit/dana yang diambil oleh perusahaan kepada Bank maupun instansi lainnya dan bertanggungjawab terhadap pemakaian kredit/dana tersebut.
2. Memberikan Laporan kepada Direktur tentang pemakaian dana/kredit yang telah dikeluarkan dan jumlah sisa kredit perusahaan terhadap Bank ataupun instansi lainnya setiap bulan.
4. Memberikan Laporan kepada Bagian Keuangan tentang konsumen yang membeli rumah dengan cara mencicil yang dananya telah dibayar oleh perusahaan.

#### Tugas dan wewenang Bagian Lapangan

1. Bertanggungjawab terhadap kegiatan/pelaksanaan pembangunan rumah yang telah dipesan oleh konsumen.
2. Mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pekerja dilapangan.
3. Memberikan Laporan kepada Bagian Keuangan tentang jumlah pegawai harian yang masuk.
4. Memberi masukan kepada Bagian Produksi tentang jumlah pegawai tidak tetap yang akan digunakan untuk proses pembuatan rumah.

## 2.2 Usaha PT. Kersna Putra Agung Jember

Terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam industri perbankan di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 2000 sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter memberikan pukulan yang sangat keras terhadap industri property di Indonesia tak terkecuali pada PT Kersna Putra Agung Jember.

Pada awalnya PT. Kersna Putra Agung menggunakan jasa bank untuk menggerakkan roda usahanya dan dengan adanya krisis di sektor perbankan membuat kondisi finansial PT. Kersna Putra Agung terpuruk. Implikasi nyata dari terpuruknya PT. Kersna Putra Agung adalah turunnya tingkat permintaan rumah oleh konsumen. Turunnya permintaan rumah terjadi karena peningkatan harga rumah yang berlipat. Seiring dengan tingginya biaya produksi rumah itu sendiri kondisi penurunan permintaan juga tidak lepas dari adanya krisis ekonomi yang harus dihadapi masyarakat.

Menghadapi kondisi yang demikian memaksa pemimpin perusahaan melakukan efisiensi dengan jalan rasionalisasi karyawan yang sangat mencolok hingga tinggal 19 karyawan dari 34 karyawan sebelumnya. Disamping itu juga terjadi perubahan didalam sistem atau proses pembelian dan pembiayaan jika dahulu memakai jasa bank maka sekarang dikelola sendiri oleh perusahaan.

### **2.3 Pelaksanaan Produksi**

Pada saat ini pelaksanaan produksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan order yang diperoleh melalui tender yang diterima perusahaan. Produksi untuk rumah dari para konsumen dilaksanakan setelah akad perjanjian beli dilaksanakan. Proses pembuatan rumahpun mengikuti selera konsumen sesuai dengan kemampuannya artinya konsumen dapat memilih atau menentukan sendiri lokasi, bahan bangunan, model rumah, type rumah dll. Pada saat terjadi akad pembelian rumah oleh konsumen disertai dengan pembayaran uang muka (down payment) guna mendapat jaminan investasi dari konsumen. Dan untuk pembayaran berikutnya dilayani dan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan pola angsuran kredit yang telah ada diperusahaan. Pada suatu ketika perusahaan dapat melakukan investasi pembuatan rumah meskipun belum ada order dari konsumen dengan membangun sesuai dengan standar yang ada baik itu Rumah Sederhana (RS), Rumah sederhana Plus (RS Plus) maupun jenis Rumah Sangat Sederhana (RSS).

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA(PKN)

#### 3.1. Diskripsi (Gambaran ) Tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) Perpajakan. Mahasiswa yang dapat melaksanakan program Praktek Kerja Nyata adalah mereka yang minimal telah menempuh 100 SKS

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER, yang terletak di jalan Basuki Rachmat (Perum Pondok Gede Permai) Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 November – 30 November 2002, dengan jadwal efektif 6 hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis memperoleh pengarahan dan penjelasan mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan, baik mengenai tempat maupun kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam Praktek Kerja Nyata tersebut penulis diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir.

Minggu pertama dimulai tanggal 01 November sampai dengan 09 November 2002 minggu ini merupakan awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER yang diawali dengan sambutan kepala seksi Personalia penanggungjawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Selanjutnya kepala seksi Personalia memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan baik sifat usaha, struktur organisasi, maupun lingkungan kerjanya. Pada minggu ini penulis ditempatkan pada Bagian Umum selama dua hari. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Bagian Umum adalah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tunjangan karyawan



dan membantu mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Kemudian penulis ditempatkan pada Bagian Pemasaran. Sebelumnya penulis mengadakan pengenalan dengan karyawan dan karyawan di Bagian Pemasaran, selanjutnya penulis diberi penjelasan mengenai tugas-tugas yang dikerjakan pada bagian Pemasaran. Kegiatan penulis selama di Bagian Pemasaran yaitu membantu mengagendakan tugas karyawan yang dinas di luar.

Minggu kedua dimulai dari tanggal 11 November sampai dengan 16 November 2002, dalam minggu ini penulis mulai melakukan pencarian data atau informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang akan diajukan, yaitu mengenai; pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER dan mempelajari masalah pemutusan pembangunan serta pembangunan baru. Selain itu menyetik laporan kavling baru di wilayah ABC.

Minggu ke tiga dimulai tanggal 18 November sampai dengan 23 November 2002, penulis tetap melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara interview dengan salah satu karyawan perusahaan tentang pajak Penghasilan untuk pegawai tetap baik masalah kegiatannya pemotongannya, tata cara penyampaian dan penyetoran pajak yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721B. Disamping itu penulis tetap melaksanakan aktivitas yang lain misalnya menyetik surat perintah kerja yang pakai alat, menyetik memo tunggakan KPR yang sudah lunas wilayah ABC.

Minggu ke empat dimulai tanggal 25 November sampai dengan 30 November 2002, minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Pada minggu ini melakukan konsultasi pada Ny. Ketty Ernawati selaku pembimbing dalam Praktek Kerja Nyata di PT KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER. Selain itu penulis juga meminta penilaian kepada Kepala Bagian Pemasaran diantaranya :

- a. Kelakuan dan kedisiplinan;
- b. Inisiatif dan kreativitas;
- c. Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata;

d. Hubungan dengan lingkungan kerja.

Setelah semua kegiatan selesai penulis mohon diri dan berpamitan dengan Bapak M. Nasir Dahlan, selaku pimpinan PT KERSNA PUTRA AGUNG GROUP Jember beserta seluruh staff karyawan dan karyawan.

### 3.1.1 Pengertian-Pengertian (Istilah) Perpajakan

#### a. Pengertian pajak secara umum

Menurut Soemitro (1977:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan mengatur.

#### b. Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21

Menurut Waluyo (1999:91) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan penyelenggara kegiatan



Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

### **c. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Mardiasmo (2002:139) Objek Pajak Penghasilan Penghasilan 21 setiap penghasilan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan, misalnya:

- a. Penghasilan atas gaji dan upah;
- b. Penghasilan atas jasa produksi;
- c. Penghasilan atas pegawai tidak tetap;
- d. Penghasilan atas honorarium.

### **d. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Munawir(1999:173) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan perpajakan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak termasuk pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah.

### **e. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (1999:100) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan pegawai tetap/penerima pensiun yang dipotong pajak setiap bulan adalah:
  - a) Untuk menentukan penghasilan netto;

Jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 5% (maksimal Rp1.296.000,00 setahun dan atau/Rp108.000,00 sebulan, sedangkan untuk pensiun Rp36.000,00 sebulan)

b) Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak(PKP);

Penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak(PTKP) yang berlaku yaitu:

- WP sendiri.....	Rp 2.880.000,00
- WP kawin.....	Rp 1.440.000,00
- Istri kerja .....	Rp 2.880.000,00
- Tiga tanggungan.....@	Rp 1.440.000,00

c) Untuk menentukan pajak yang terutang;

Besarnya PKP dikalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh 17 tahun 2000 yaitu:

0 - Rp25.000.000,00.....	10%
Rp 25.000.000,00 - Rp50.000.000,00.....	15%
Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00.....	30%

- Penghasilan pegawai lepas yang dipotong pajaknya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan
- Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, yang dipotong pajaknya adalah 15% x 40% x penghasilan bruto, uang tebusan dan uang pesangon yang dipotong pajaknya adalah 15% x penghasilan bruto, PDL asuransi dan penjaja barang yang dipotong pajaknya adalah 10% x penghasilan bruto bersifat FINAL.

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap:

Tuan Budi bekerja sebagai Staff Keuangan pada PT. Seger Waras dengan gaji Rp 900.000,00 sebulan. Tiap bulannya harus membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp 25.000,00 dan Rp 15.000,00. Tuan Budi mempunyai istri dan 2 orang anak. Berapa PPh yang harus dibayar oleh Tuan Budi?

Jawab:

Gaji sebulan Rp. 900.000,00

Dikurangi:

- Biaya Jabatan	Rp. 45.000,00	
- Iuran Pensiun	Rp. 25.000,00	
- Iuran THT	Rp. 15.000,00	(Rp. 85.000,00)

Penghasilan netto sebulan..... Rp 85.000,00

Penghasilan netto setahun ..... Rp. 9.780.000,00

(12 x Rp. 815.000,00)

PTKP setahun :

Wajib pajak sendiri	:	Rp. 2.880.000,00	
Wajib pajak kawin	:	Rp. 1.440.000,00	
Tanggungan 2 anak	:	<u>Rp. 2.880.000,00</u>	
			(Rp. 7.200.000,00)

Penghasilan Kena Pajak..... Rp. 2.580.000,00

PPh Terutang :

5% x Rp. 2.580.000,00 = Rp. 129.000,00

Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan Budi adalah Rp. 129.000,00

#### f. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut Mardiasmo (2002:20) Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah

1. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang saat dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut kepada orang pribadi atau badan pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
2. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP);

3. Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 21 dan 26, sedangkan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

#### **g. Pengertian Pegawai Tetap**

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, dan hanya menerima/memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

#### **h. Pegawai Tetap Pada PT. Kersna Putra Agung Jember**

PT. Kersna Putra Agung Jember merupakan perusahaan yang memberikan jasa pembangunan pada seluruh masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan penyediaan rumah sederhana PT. Kersna Putra Agung Jember pasti membutuhkan pegawai yang benar-benar dapat membantu kegiatan operasionalnya baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Dalam hal menentukan pegawai tetap, perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja melalui penyeleksian dari calon pegawai yang mengajukan permohonan untuk bekerja. Sehingga mereka yang memenuhi kriteria dari perusahaan akan diterima bekerja sebagai pegawai tetap.

#### **3.1.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap**

Salah satu perwujudan sebagai warga negara, maka pegawai/karyawan PT. Kersna Putra Agung Jember wajib untuk membayar pajak sebagai kewajibannya terhadap negara. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang berkembang sehingga memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak terutang tidak terkecuali dengan PT. Kersna Putra Agung Jember dalam melakukan perhitungan pajak terutang atas seluruh pegawai baik itu pegawai tetap

maupun tidak tetap. Dengan perhitungan yang kesemuanya telah menggunakan proses komputerisasi, maka praktis tidak dapat ikut serta dalam melakukan perhitungan pajak terutangnya penulis dapat mempelajarinya setelah diberi print outnya dan sedikitnya penjelasan mengenai cara perhitungannya.

Setelah dilakukan perhitungan pajak terutang atas dasar daftar gaji bulan sebelumnya, maka Kasubsi Perbendaharaan sebagai bendaharawan melakukan pemotongan pajak atas gaji pegawai. Pemotongan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji yaitu setiap tanggal 27 setiap bulannya dan atas pemotongan tersebut dibuatkan bukti pemotongan yang nantinya dilampirkan dalam SPT Masa pada saat melakukan pelaporan ke kantor Pelayanan Pajak.

#### Contoh penghitungan pajak

Bapak Sentot adalah karyawan tetap dengan jabatan Staff Administrasi di PT. Kersna Putra Agung Jember dengan status kawin mempunyai 2 orang anak. Bapak Sentot mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 800.000 dan mendapat tunjangan anak Rp. 30.000 serta tunjangan beras sebesar Rp. 50.000. Pajak yang harus dipotong oleh bendaharawan PT. Kersna Putra Agung Jember adalah sebagai berikut :

Gaji pokok		Rp. 800.000
Tunjangan anak		Rp. 30.000
Tunjangan beras		Rp. 50.000
Penghasilan bruto		<u>Rp. 880.000</u>
Biaya jabatan : 5% x Rp. 880.000		Rp. 44.000
Untuk penghasilan netto sebulan		<u>Rp. 836.000</u>
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
Wajib pajak	Rp. 240.000	
Kawin	Rp. 120.000	
2 orang	<u>Rp. 240.000</u>	
		<u>Rp. 600.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan kebawah dalam		

ribuan penuh)

Rp. 236.000

Tarif 5% x Rp. 236.000 = Rp. 11.800

Jadi, pajak yang terutang adalah **Rp. 11.800**

### **3.1.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 di PT. Kersna Putra Agung Jember.**

PT. Kersna Putra Agung Jember melakukan penyetoran pajaknya dengan menggunakan jasa kantor pos dan/biro melalui Surat Setoran Pajak (SSP). SSP menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang. SSP yang disetor ke kantor Pelayanan Pajak adalah SSP lembar ke tiga dan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila terlambat akan dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan. Sedangkan untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang baik masa maupun tahunan. SPT yang dilaporkan adalah SPT masa PPh pasal 21 dan 26, SPT masa PPh pasal 23 dan 26, SPT masa PPN, SPT Tahunan PPh pasal 21. Untuk SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya, jika terlambat dikenakan denda Rp. 25.000. Sedangkan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, jika terlambat dikenakan denda Rp. 50.000.

### **3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya.**

PT. Kersna Putra Agung Jember adalah wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 1.612.954.6-626. Sebagai wajib pajak badan, PT. Kersna Putra Agung Jember juga merupakan pemberi kerja yang harus melaksanakan semua kewajibannya pada negara, salah satunya melaksanakan pemotongan pajak atas gaji

pegawai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini PT. Kersna Putra Agung Jember telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, meskipun penanggung pajak tidak dilimpahkan pada pihak lain dalam artian pengisian SPT Masa dan SPT Tahunan dilaksanakan oleh pegawainya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan yang diberikan kantor penyuluhan dan buku petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dalam 5 tahun terakhir ini perhitungan SPT Tahunan 1721 selalu menunjukkan adanya kelebihan bayar, namun hal itu tidak menimbulkan komplain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Karena menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut memang sebenarnya. PT. Kersna Putra Agung Jember selalu menyampaikan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Adapun SPT yang disampaikan meliputi SPT Massa PPh pasal 23, SPT Massa PPh pasal 21 dan 26, SPT Tahunan PPh pasal 21 atas badan, yaitu formulir 1771 dan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap melalui formulir 1721. SPT Tahunan yang disampaikan melalui formulir 1721 atas nama PT. Kersna Putra Agung Jember.

#### IV. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Dari rangkaian Laporan yang dibuat dan diselesaikan oleh penulis dapat digambarkan bahwa bagi penulis bisa memperoleh pengalaman kerja yang sesungguhnya dan bisa membandingkan antara teori-teori yang didapat pada saat kuliah dengan pelaksanaan dilapangan. Dan juga penulis mendapatkan pengetahuan tentang mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap pada PT. Kersna Putra Agung Jember.

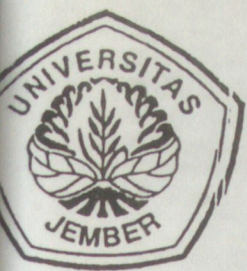
Penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis terutama kepada semua Staff PT. Kersna Putra Agung Jember untuk menyelesaikan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata dan penulis mengharapkan kritik dan saran guna tercapainya kesempurnaan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata ini. Semoga Laporan ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.





DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. 2000. *Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak-Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 545/Pj.1/2000 tentang Pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawir. HS. 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemitro. Rachmat. 1977. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Waluyo. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



SURAT - TUGAS

No. : 3623 /J25.1.2/PP.9/2002

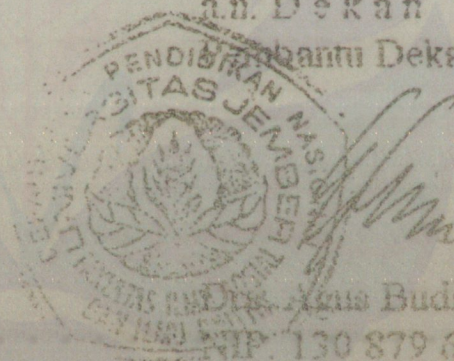
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menitaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	Wahyu Luhanto	99-1004
2	Achmad Samsul A.	99-1144

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. "Garoeda Buana Indah" di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2002 ~~2002~~ <sup>30</sup> Nopember 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang di dasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.  
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

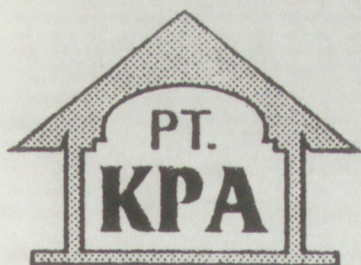
Jember, 29 Oktober 2002

an. Dekan  
Bantuan Dekan I,



Lampiran kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kabag. Pendidikan FISIP UNEJ.



# PT. KRESNA PUTRA AGUNG

REAL ESTATE - DEVELOPER - GENERAL CONTRACTOR

ANGGOTA REI No.

Kantor: Jl. Basuki Rahmad Blok A. 1 HP. 082 331 0854

(Perum Pondok Gede Permai)

Bank : BTN Cabang Jember

## SURAT KETERANGAN

No: 036/KE/SE, XII, 2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : WAHYU JULIANTO  
NIM : 99-1004  
Jurusan : Diploma-III Pajak FISIP  
Univ : Universitas Negeri Jember
2. Nama : ACHMAD SYAMSUL ARIFIN  
NIM : 99-1144  
Jurusan : Diploma-III Pajak FISIP  
Univ : Universitas Negeri Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER sejak tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2002 dengan hasil/prestasi : Baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

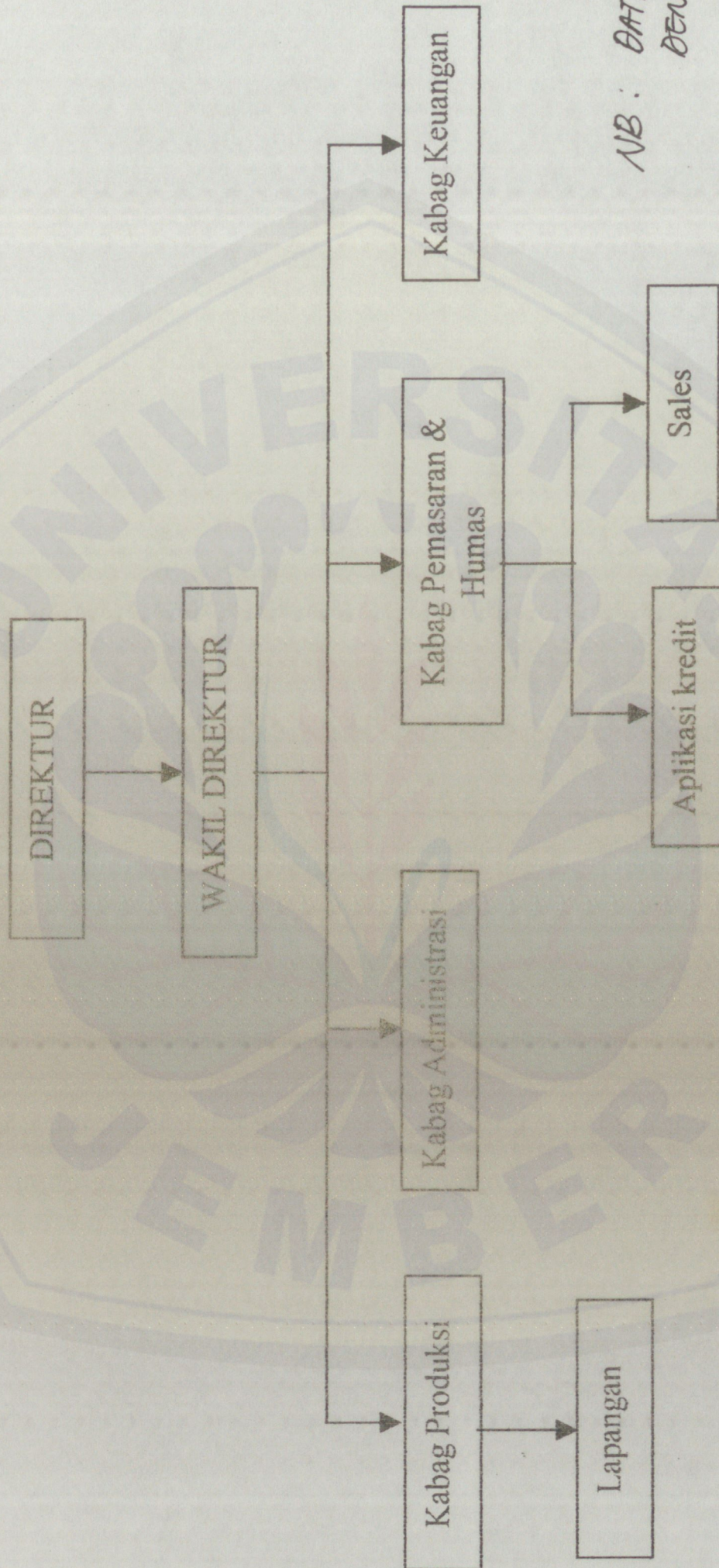
Jember, 1 Desember 2002

PT. KRESNA PUTRA AGUNG  
GROUP  
JEMBER

  
M. NASIR DAHLAN

DIREKTUR

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI  
PT. KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER



NB: DATA INI BERUANG  
DENGAN ASLINYA

PT. KERSNA PUTRA  
AGUNG GIB. UB.  
JEMBER

M. NAFIK DAHLAN

Sumber Data : PT. KERSNA PUTRA AGUNG JEMBER



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

**NPWP**

: [ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ] - [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ]

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**NAMA WP**

: .....

**ALAMAT**

: .....

**MAP/Kode Jenis Pajak**

**Kode Jenis Setoran**

**Uraian Pembayaran**

[ ][ ][ ][ ]

[ ][ ][ ][ ]

.....  
.....  
.....  
.....

**Masa Pajak**

**Tahun**

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

[ ][ ][ ][ ]

*Diisi tahun terutangnya pajak*

*Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

**Nomor Ketapan**

: [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

*Diisi sesuai Nomor Ketapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

**Jumlah Pembayaran**

*Diisi dengan rupiah penuh*

**Terbilang**

: .....

Rp. ....

.....  
.....

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*

**Wajib Pajak/Penyetor**

..... tgl .....

*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **2**  
Untuk KPP melalui KPKN

**NPWP** : [ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ] . [ ] - [ ][ ][ ] . [ ][ ][ ]

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**NAMA WP** : .....

**ALAMAT** : .....

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
[ ][ ][ ][ ]	[ ][ ][ ]	.....
		.....
		.....
		.....

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	[ ][ ][ ][ ]
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

**Nomor Ketetapan** : [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	<b>Terbilang</b> : .....
Rp. ....	.....

<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

**NPWP** :     .     .     .  -     .

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**NAMA WP** : .....

**ALAMAT** : .....

.....

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	.....
		.....
		.....
		.....

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>

**Nomor Ketetapan** :     /     /     /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	<b>Terbilang</b> : .....
Rp. ....	.....

<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ..... tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**4**

Untuk Bank Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

**NPWP**

:       :

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**NAMA WP**

: .....

**ALAMAT**

: .....  
.....

**MAP/Kode Jenis Pajak**

**Kode Jenis Setoran**

**Uraian Pembayaran**

.....  
.....  
.....  
.....

**Masa Pajak**

**Tahun**

**Jan** **Peb** **Mar** **Apr** **Mei** **Jun** **Jul** **Ags** **Sep** **Okt** **Nop** **Des**

*Diisi tahun terutangnya pajak*

*Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*

**Nomor Ketetapan**

:     /    /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

**Jumlah Pembayaran**

*Diisi dengan rupiah penuh*

**Terbilang**

: .....  
.....  
.....

Rp. ....

**Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran**

**Tanggal** .....

*Cap dan tanda tangan*

**Wajib Pajak/Penyetor**

..... tgl .....

*Cap dan tanda tangan*

**Nama Jelas** : .....

**Nama Jelas** : .....

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

**NPWP** :  .    .     .  -     .

*Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki*

**NAMA WP** : .....

**ALAMAT** : .....

---

<b>MAP/Kode Jenis Pajak</b>	<b>Kode Jenis Setoran</b>	<b>Uraian Pembayaran</b>
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	..... ..... ..... .....

---

<b>Masa Pajak</b>											<b>Tahun</b>		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>		

---

**Nomor Ketetapan** :     /    /    /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

---

<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	<b>Terbilang</b> : .....
Rp. ....	..... ..... .....

---

<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyeter</b> ..... tgl ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas</b> : .....	<b>Nama Jelas</b> : .....

---

**Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran**

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1771



ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK  
 BERI TANDA "X" DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI  
 ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS  
 SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL	TH
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK : .....

ALAMAT : .....

KOTA : ..... KODE POS :  NO. TELP : .....

NEGARA DOMISILI : .....

KANTOR PUSAT (KHUSUS BUT) : .....

JENIS USAHA : ..... KLU :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :  DIAUDIT  TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : .....

NPWP :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : .....

NPWP :

			RUPIAH
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (DIISI DARI FORMULIR 1771-I NOMOR 6 KOLOM 3) >	
	2.	KOMPENSASI KERUGIAN (DIISI DARI LAMPIRAN SPT) >	
	3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) >	
B. PPh TERUTANG	4.	PPh YANG TERUTANG (TARIF PPh Ps. 17 X ANGKA 3) >	
	5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU >	
	6.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) >	
C. KREDIT PAJAK	7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PROYEK BANTUAN LN) >	
	8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1771-II) >	
		b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1771-III) >	
		JUMLAH (a + b) >	
	9.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8) >	
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	
	10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
		a. PPh Ps. 25 BULANAN >	
		b. STP PPh Ps. 25 (HANYA POKOK PAJAK) >	
		c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI >	
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN >			
	JUMLAH (a + b + c + d) >		
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) >	
		b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	

E. PERMOHONAN	JUMLAH PPh PADA ANGKA 11.b. MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK							
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....> b. KOMPENSASI KERUGIAN : (DIISI DARI LAMPIRAN SPT) .....> c. PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b) .....> d. PPh YANG TERUTANG (TARIF Ps. 17 X HURUF c) .....> e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a .....> f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e) .....> g. PPh PASAL 25 : (1/12 X HURUF f) .....>	RUPIAH         						
G. PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL PPh TERUTANG (DIISI DARI FORMULIR 1771-IV BAGIAN A JUMLAH KOLOM 5) .....> b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (DIISI DARI FORMULIR 1771-IV BAGIAN B JUMLAH KOLOM 3) .....>	  						
H. LAMPIRAN	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (WAJIB BAGI SEMUA WAJIB PAJAK) <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (WAJIB BAGI SEMUA WAJIB PAJAK) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL <input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (KHUSUS BUT) <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....							
I. PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.   <table border="1" data-bbox="386 2052 1738 2285"> <tr> <td data-bbox="386 2052 869 2111">NAMA LENGKAP</td> <td data-bbox="869 2052 1333 2111">JABATAN / KEDUDUKAN</td> <td data-bbox="1333 2052 1738 2111">TANDA TANGAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="386 2111 869 2285"></td> <td data-bbox="869 2111 1333 2285"></td> <td data-bbox="1333 2111 1738 2285"></td> </tr> </table>		NAMA LENGKAP	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN			
NAMA LENGKAP	JABATAN / KEDUDUKAN	TANDA TANGAN						



**SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP/BADAN**

FORMULIR

**1771 - I**

LAMPIRAN - I

● **PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

TAHUN PAJAK

BL	TH.	s.d	BL	TH
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

NPWP : [ ]

NAMA WAJIB PAJAK : .....

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA : ● GAJI .....	
	● BUNGA .....	
	● ROYALTI .....	
	● SEWA .....	
	● JASA .....	
	● BIAYA-BIAYA LAINNYA .....	
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (a - b - c) .....	
e.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA .....	
	JUMLAH d dan e : .....	
2.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	
3.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ....	
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN. ....	
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN. ....	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. ....	
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN. ....	
f.	PAJAK PENGHASILAN. ....	
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM. ....	
h.	SANKSI ADMINISTRASI. ....	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL. ....	
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL. ....	
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA. ....	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA. ....	
	JUMLAH a s.d. l : .....	
4.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL. ....	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL. ....	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA. ....	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA. ....	
	JUMLAH a s.d. d .....	
5.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE [ ] (DIISI DARI LAMPIRAN SPT) .....</b>	
6.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (1 - 2 + 3 - 4 - 5) .....</b>	

**CATATAN :** PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 6 KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 1.

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR

1771 - III



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

• KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

BL  TH  s.d  BL  TH

NO.	NPWP : <input type="text"/>	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI (1)	JENIS PENGHASILAN (3)	Jumlah NETO (RUPIAH) (4)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (RUPIAH) (7)
					RUPIAH (5)	VALAS (6)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					JUMLAH :		

NAMA WAJIB PAJAK : .....

- CATATAN :**
- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
  - KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
  - KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS
  - PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8. b.
  - JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOP) SESUAI KEPERLUAN.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
Kantor Pusat Pajak

# SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

Digital Repository Universitas Jember

FORMULIR

# 1771 - IV

## LAMPIRAN - IV

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL TH

P W P :

NAMA WAJIB PAJAK : .....

### AGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI		20%	
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		20%	
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0,1%	
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0,1%	
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM PERTAMINA			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		0,15%	
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (YAYASAN / ORG.SEJENIS)		5%	
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		10%	
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI		2%	
	b. PERENCANA KONSTRUKSI		4%	
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI		4%	
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0,44%	
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		2,64%	
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		1,2%	
12.	.....			
13.	.....			
<b>JUMLAH :</b>				

### AGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (PASAL 4 AYAT (3) HURUF F UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	.....	
8.	.....	
<b>JUMLAH :</b>		

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1771 - VI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL TH
□	□	□	□ □

NPWP : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

NAMA WAJIB PAJAK : .....

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			RUPIAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PINJAMAN DARI :					
PINJAMAN KEPADA :					

